

ABSTRAK

Ahmad Nur Hidayatullah. 2026. Kajian Yuridis Normatif Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Online Jual Beli Produk *Skincare* di *Platform Digital*. Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. Pembimbing (II). Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn

Transaksi jual beli online produk *skincare* telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, namun kemudahan ini turut membuka celah bagi maraknya praktik penipuan, seperti klaim manfaat produk yang berlebihan, pemalsuan identitas produk, penggunaan informasi palsu, hingga peredaran produk tanpa izin edar BPOM. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidaksinkronan norma dalam mengatasi modus penipuan digital yang terus berkembang, sehingga diperlukan kajian doktrinal untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi online, mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan produk *skincare* di platform digital, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penipuan transaksi online telah diatur secara komplementer melalui KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (Pasal 492), UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, termasuk pihak yang turut mempromosikan klaim menyesatkan. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif (pengawasan BPOM, edukasi, dan pengawasan platform) dan perlindungan represif (pelaporan, gugatan ganti rugi, penyelesaian sengketa, dan sanksi hukum), yang menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memiliki mekanisme yang cukup memadai untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan digital.

Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Online, *Skincare*, Perlindungan Konsumen, KUHP Nasional

ABSTRACT

Ahmad Nur Hidayatullah.2026.A Normative Juridical Study on the Criminal Act of Fraud in Online Skincare Product Sales Transactions on Digital Platforms. Undergraduate Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I): Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. Supervisor (II): Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.K

Online transactions for skincare products have expanded rapidly alongside technological advancements; however, this convenience has also created opportunities for widespread fraud such as exaggerated product claims, product identity falsification, the use of misleading information, and the distribution of products lacking BPOM (Indonesian FDA) marketing authorization. This situation has resulted in legal gaps and normative inconsistencies regarding the handling of evolving digital fraud schemes, necessitating a doctrinal study to establish an appropriate legal framework. This research aims to analyze legal regulations concerning fraud in online transactions, examine the criminal liability of perpetrators of skincare product fraud on digital platforms, and analyze the forms of legal protection available to consumers. The study employs a normative-juridical method with a descriptive nature, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, while analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. The findings indicate that legal regulations regarding online transaction fraud are addressed complementarily through the Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (Article 492), the Consumer Protection Law, and the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law). Perpetrators including parties who promote misleading claims—may be held criminally liable if the element of culpability is met and there are no grounds for justification or excuse. Legal protection for consumers is implemented through two forms: preventive protection (BPOM supervision, education, and platform oversight) and repressive protection (reporting, claims for damages, dispute resolution, and legal sanctions). These measures demonstrate that Indonesian positive law possesses adequate mechanisms to protect consumers from digital fraud practices.

Keywords: *Fraud, Online Transactions, Skincare, Consumer Protection, National Criminal Code*